



PKL Lesehan Tetap Minta Relokasi Ditunda

■ Pemda DIY Tegaskan Pemindahan Sudah Direncanakan Secara Matang

YOGYA, TRIBUN - Para Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro masih meminta untuk penundaan relokasi. Bahkan, suasana audiensi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY menjelang penataan PKL Malioboro berlangsung panas, Rabu (26/1) siang.

Para PKL membawa spanduk bertuliskan keluhan kesah atas adanya relokasi PKL di Teras Malioboro. Secara bergantian para ketua paguyuban PKL itu menyuarakan aspirasinya. Sementara di dalam ruang rapat DPRD DIY, para wakil rakyat sedang berdiskusi dengan instansi terkait dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji.

"Hari ini (kemarin, Red) kami menggelar doa bersama. Kami menunggu hasil audiensi di dalam (ruang rapat) supaya relokasi ditunda," kata Ketua Paguyuban PKL Malioboro Handayani, Sogi Wartono saat ditemui di DPRD DIY.

Selain penundaan relokasi, Wartono juga meminta agar pemerintah Kota Yogyakarta memperbaiki lapak yang nantinya dijadikan tempat relokasi. "Soalnya itu tidak layak. Terlalu sempit, kami sebetulnya menolak. Cuma karena dirayu oleh pemerintah ya akhirnya nerima. Sebenarnya itu tidak layak," tegas Wartono.

Dia menambahkan, mayoritas pedagang meminta penundaan sampai dengan Idul Fitri tahun ini. "Tapi kalau lebaran itu masih kurang. Paling tidak tiga tahun lah penundaan. Supaya kami benar-benar siap. Karena ada yang bayar hutang, cicilan motor, dan lainnya," terangnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Yogyakarta, Fokki Ardianto yang turut mengawal jalannya audiensi itu mengatakan, sesuai ketegasan pihaknya hadir dalam

GELAR AUDIENSI

- Para PKL Malioboro masih meminta untuk penundaan relokasi.
- Mereka menggelar audiensi di gedung DPRD DIY menjelang penataan PKL Malioboro, Rabu (26/1) siang.
- Mereka menilai tempat yang disediakan kurang layak.
- Pemda DIY menegaskan rencana relokasi sudah dipersiapkan secara matang.

audiensi untuk menyampaikan hasil rapat dengan pemerintah Kota Yogyakarta dan hasil rapat dengan pendapat umum beberapa hari lalu.

"Tadi beberapa hal ditegaskan oleh Sekda DIY, bahwa relokasi ada tim yang dibentuk sesuai SK Gubernur. Di dalam SK itu melibatkan Pemkot Yogyakarta dan pemerintah DIY," katanya usai rapat audiensi.

Fokki menilai atas SK Gubernur itu baik pemkot Yogyakarta maupun pemerintah DIY terkasas saling tanggung jawab. "Jadinya *uncat-uncalan* (lempar-lemparan) persoalan kewenangan. Karena tim ini SK-nya SK gubernur," tegasnya.

Selain itu, Fokki menilai jawaban Sekda DIY sangatlah jelas, ketika para PKL meminta adanya penundaan relokasi setelah lebaran namun justru proses pemindahan diadwalkan lebih awal.

"Jawaban sekda sangat jelas bahwa proses libur lebaran jadi salah satu promosi jika PKL ada di Teras Malioboro 1 dan 2," kata Fokki.

Ajang promosi
 Sekretaris Daerah (Sekda)

DIY, Kadarmanta Baskara Aji, pun memberi penjelasan kepada peserta audiensi. Menurutnya, waktu pelaksanaan relokasi telah dipikirkan secara matang.

Pemda DIY pun kukuh untuk merelokasi pedagang di awal tahun ini.

Menurutnya, momen Lebaran juga bisa menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan dua tempat belanja yang baru ditempati PKL. Sebab, tingkat kunjungan wisatawan ke Malioboro akan meningkat signifikan saat hari raya.

"Justru itu sudah kita pikirkan betul. Kalau kita mengambil momen Lebaran (PKL) ada (jualannya) di (selasar) Malioboro, orang lainnya itu (selasar) itu tempat belanja di Malioboro," jelas Aji.

"Tapi pada saat Lebaran orang itu keinginannya untuk belanja sangat tinggi. Begitu melihat (selasar) Malioboro kosong, mereka akan mencari di mana mereka bisa belanja. Jadi dia akan datang di situ (eks Bisopok Indra dan eks Dispar DIY)," tambahnya.

Jika PKL sudah direlokasi sebelum hari raya, Aji meyakini bahwa ke depannya wisatawan akan lebih mengenal spot berbelanja baru tersebut sehingga popularitasnya bakal meningkat. "Nah sejak besok Lebaran itu orang seluruh Indonesia tahu bahwa belanjanya tidak lagi di (plnggr) jalan tapi di sebuah tempat yang sangat layak," jelasnya.

Aji juga berjanji untuk memfasilitasi pedagang yang baru dipindah. Termasuk upaya promosi dan pemasangan rambu petunjuk jalan. "Kami tetap akan fasilitasi untuk pemasarannya, petunjuk rambu agar orang bisa datang ke situ lebih mudah. Kami juga akan buka akses di Jalan Mataram untuk masuk ke lokasi ini," bebernya. **(hda/tro)**



SUARAKAN ASPIRASI - Suasana doa bersama dan audiensi PKL Malioboro di halaman DPRD DIY, Rabu (26/1).

TRIBUN JOGJA/MEPTA/IL HUSA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005